

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan suatu bentuk perwujudan pelaksanaan *good governance* yang merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai cita – cita dan tujuan organisasi. Dalam konteks *good governance* tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Solok. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

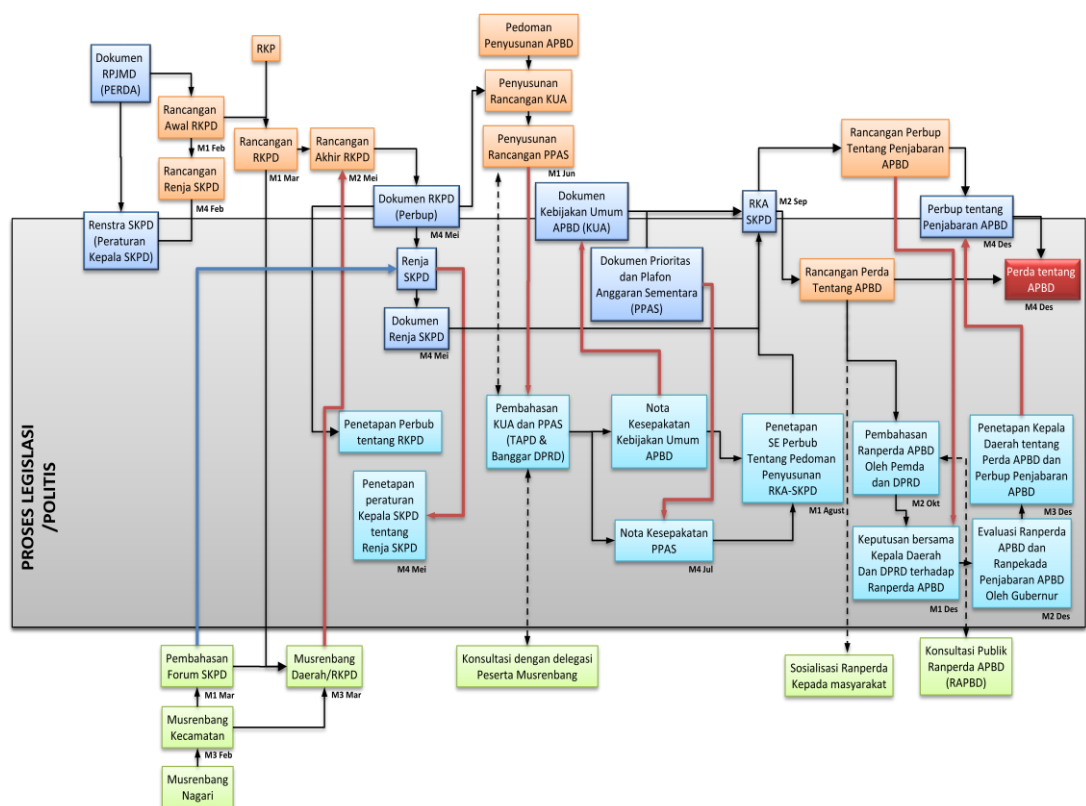
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun baik untuk jangka panjang (RPJP) maupun jangka menengah (RPJM). RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, sedangkan RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 tahun.

Dalam konteks pelaksanaan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut dari RPJP Daerah dan RPJM Daerah maka setiap SKPD di Kabupaten Solok perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD. Dalam renstra SKPD memuat dan menjabarkan visi dan misi berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dengan demikian Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah lainnya.

Keterkaitan dokumen perencanaan yang diuraikan diatas, akan digambarkan sebagaimana bagan berikut ini :



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok tahun 2016- 2021 dilandasi hukum dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011 - 2015;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat Daerah periode 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan renstra Sekretariat Daerah

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi, dan program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih, penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD TAHUN 2016-2021

menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari tahun 2016 – 2021 yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Dasar hukum pembentukan SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, dengan uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten

Asisten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah sesuai urusan sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan

Asisten pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan umum, administrasi pertanahan, hukum dan hak azazi manusia. Asisten ini membawahi :

- 1) Bagian Pemerintahan Umum;
- 2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 3) Bagian Administrasi Pertanahan.

b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ekbangkesra)

Asisten Ekbangkesra mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Asisten ini membawahi :

- 1) Bagian Pembangunan;
- 2) Bagian Perekonomian; dan
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c. Asisten Administrasi,

Asisten administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan organisasi dan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat dan umum. Asisten ini membawahi :

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan

3) Bagian Hubungan Masyarakat.

3. Kepala Bagian

Kepala Bagian mempunyai tugas dan kewajiban membantu asisten sesuai urusan sebagai berikut:

a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum

Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi dan kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari. Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintah Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pemerintahan Nagari.

b. Kepala Bagian Hukum dan HAM

Kepala Bagian hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum, dan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari. Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari.

c. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan

Kepala Bagian administrasi pertanahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah pertanahan, Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan Pengadaan Tanah. Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- 2) Sub Bagian Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan

3) Sub Bagian Pengadaan Tanah.

d. Kepala Bagian Perekonomian

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Administrasi Perekonomian Primer; Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier, dan Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Nagari. Kepala Bagian ini membawahi:

- 1) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;
- 2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier; dan
- 3) Sub Bagian Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Nagari.

e. Kepala Bagian Pembangunan

Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Administrasi Pembangunan, Pengendalian Administrasi Kegiatan, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kepala Bagian ini membawahi:

- 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan; dan
- 3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

f. Kepala Bagian Kesra

Kepala Bagian Kesra mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Administrasi Bina Mental, Administrasi Bimbingan dan Bantuan Sosial, dan Administrasi Pendidikan dan Kesehatan.

Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Administrasi Bina Mental;
- 2) Sub Bagian Administrasi Bimbingan dan Bantuan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Kesehatan.

g. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan umum dan Tata Usaha Pimpinan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, dan Keuangan. Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

h. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Kepala Bagian Organisasi dan reformasi birokrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Tata Laksana; Kepegawaian dan Akuntabilitas; dan Kelembagaan. Kepala Bagian ini membawahi :

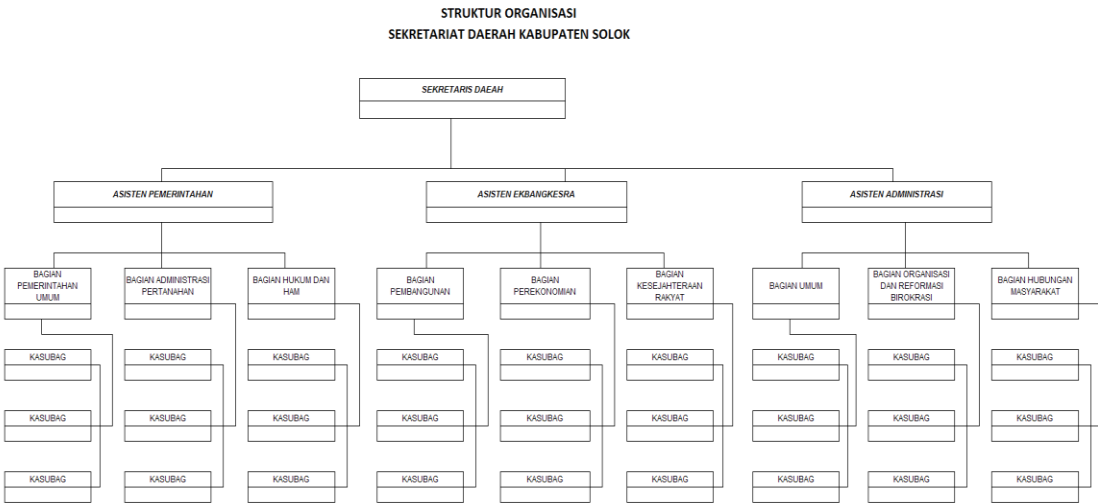
- 1) Sub Bagian Tata Laksana;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas; dan
- 3) Sub Bagian Kelembagaan.

i. Kepala Bagian humas

Kepala Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan Protokoler, Pemberitaan, dan Pengolahan Data Elektronik. Kepala Bagian ini membawahi :

- 1) Sub Bagian Protokoler;
- 2) Sub Bagian Pemberitaan; dan
- 3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Rentang kendali dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatas akan digambarkan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, yaitu :



Sesuai dengan :
Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Sumber daya yang ada pada Sekretariat Daerah terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok adalah 113 orang. Berdasarkan golongan struktur PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai Setda Kab Solok Berdasarkan Golongan
Kondisi Desember 2015

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan I	2	1,77
2	Golongan II	31	27,43
3	Golongan III	63	55,75
4	Golongan IV	17	15,05
JUMLAH		113	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa 70,8 % PNS yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok terdiri dari golongan III keatas. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok cukup mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Namun masih memiliki kesempatan yang besar yaitu 29,2 % PNS lagi untuk peningkatan karir dengan meningkatkan kompetensi. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah pegawai Setda Kab Solok Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kondisi Desember 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SD	1	0,89
2	SLTP	3	2,65
3	SLTA	32	28,32
4	Diploma	7	6,19
5	S1	50	44,25
6	S2	20	17,70
7	S3	0	0,0
JUMLAH		113	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa 61,95 % PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas. Dengan demikian secara pengetahuan kondisi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok cukup tinggi sehingga diharapkan

mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Namun ini berarti juga kesempatan untuk PNS yang belum mencapai pendidikan S1 sangat besar.

2. Aset

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Secara garis besar, nilai Asset Sekretariat Daerah berdasarkan Neraca tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Daftar Asset Tetap Sekretariat Daerah
Per 31 Desember 2015

NO	JENIS ASSET	NILAI ASSET Rp
1.	Aset Tetap	62.403.966.793
	- Tanah	13.556.069.543
	- Alat-alat Angkutan	6.286.363.900
	- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	13.743.654.732
	- Alat Studio dan Komunikasi	846.650.948
	- Bangunan Gedung	42.284.894.313
	- Instalasi	164.052.000
	- Jaringan	171.941.190
	- Buku dan Perpustakaan	13.671.453
	- Barang bercorak kesenian dan Kebudayaan	20.811.800
	- Hewan/Ternak dan Tumbuhan	2.875.000

NO	JENIS ASSET	NILAI ASSET Rp
2.	Asset Lainnya	465.227.000
	JUMLAH	62.933.182.323

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah periode 2011 – 2015 dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikannya dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari:

1. penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan reformasi birokrasi, serta umum;
2. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
3. melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD; dan
4. pelayanan Teknis administratif Bupati dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok.

Secara lengkap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada renstra periode sebelumnya dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Peserta Bimtek LAKIP				-	-	2 orang	50 orang	-	-	-	2 orang	42 orang	-	-	-	100%	84%	-
2	Jumlah Peserta Sosialisasi Perbup TATK & Tata Naskah Dinas						100 orang	100 orang	-	-	-	100 orang	-	-	-	-	100%	-	-
3	Jumlah Peserta Bimtek Anjab						29 orang	50 orang	-	-	-	29 orang	15 orang	26 orang	-	-	100%	30%	2600%
4	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur						12 orang	4 orang	-	-	-	12 orang	5 orang	5 orang	-	-	100%	125%	500%
5	Persentase meningkatnya disiplin aparatur				-	-	80 %	100 %	100 %	-	-	80 %	80 %	100 %	-	-	100%	80%	100%
6	Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan				-	7 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	4 lokasi	-	7 lokasi	5 lokasi	8 lokasi	2 lokasi	-	100%	100%	114%	50%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah Penerima Sosialisasi				-	-	225 orang	225 orang	225 Orang	-	-	225 orang	148 orang	98 orang	-	-	100%	66%	44%
8	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
9	Persentase terhabnya sarana dan prasarana sesuai renc				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
10	Persentase tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
11	Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan				lokasi	lokasi	33 lokasi	125 lokasi	33 lokasi	lokasi	lokasi	33 lokasi	113 lokasi	161 lokasi	-	-	100%	90%	488%
12	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
13	Jumlah SKPD yang menerapkan SOP						27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD			27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	-	-	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Solok				-	-	50 %	50 %	50 %	-	-	50 %	50 %	50 %	-	-	100%	100%	100%
15	Persentase SKPD yang taat TATK dan Tata Naskah Dinas				-	-	90 %	90 %	90 %	-	-	90 %	90 %	90 %	-	-	100%	100%	100%
16	Jumlah SKPD yang Dokumen Anjab dan ABK nya diperbupkan				-	-	10 SKPD	8 SKPD	9 SKPD	-	-	10 SKPD	8 SKPD	9 SKPD	-	-	100%	100%	100%
17	Persentase tersedianya bahan bacaan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase terlayani adm perkantoran				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
19	Persentase acara daerah diprotokoleri dengan baik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase File/arsip pegawai yang tertata				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Persentase terlayani urusan kepegawaian																		
	a. Berkala				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
	b. naik pangkat				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
	c. kehadiran				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
	d. cuti				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
	e. tugas belajar				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100%	100%
22	Jumlah SKPD yang disurvei Indeks Kepuasan Masyarakatnya				-	17 SKPD	16 SKPD	20 SKPD	20 SKPD	-	17 SKPD	16 SKPD	19 SKPD	20 SKPD	-	100%	100%	95%	100%
23	Persentase unit layanan publik yang bekerja baik					50 %	60 %	70 %	70 %		50 %	60 %	70 %	88,88 %	-	100%	100%	100%	127%
24	Jumlah Sosialisasi evaluasi pengadaan barang/jasa bagi penyedia jasa konstruksi				-	-	1 kali	1 kali	1 Kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
25	Persentase terbinanya penyediaan jasa konstruksi				-	-	60 %	60 %	60 %	-	-	60 %	60 %	60 %	-	-	100%	100%	100%
26	Persentase sistem layanan publik yang tersusun				-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%
27	Jumlah ruang yang berfungsi e-officenya				-	-	-	16 ruang	16 Ruang	-	-	-	-	0 ruang	-	-	-	-	0%
28	Persentase acara-acara daerah yang terfasilitasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah Rakor Muspida				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 Kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah				1 MoU	2 MoU	2 MoU	2 MoU	2 MoU	1 MoU	2 MoU	2 MoU	0 MoU	0 MoU	100%	100%	100%	0%	0%
31	Persentase terkoordinasi nya kerjasama pembanguna n				-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
32	Jumlah perusahaan calon investor yang mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama				-	-	1 persh	1 persh	1 Persh	-	-	1 persh	3 persh	2 persh	-	-	100%	300%	200%
33	Jumlah Koordinasi dalam menangani masalah investasi						40 kali	40 kali	40 Kali			40 kali	54 kali	41 kali	-	-	100%	135%	103%
34	Persentase terlaksananya dialog				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase kunjungan yang dapat diterima				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase inspeksi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
37	Persentase terlaksananya koordinasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
38	Persentase kunjungan ke luar daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
39	Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku				95 %	97 %	97 %	98 %	100 %	95 %	97 %	97 %	98 %	98 %	100%	100%	100%	100%	98%
40	Persentase penurunan hasil temuan dari Tim Pemeriksa terhadap hasil pekerjaan				50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	100%	100%	100%	100%	100%
41	Persentase kegiatan yang bermasalah dapat diantisipasi dari awal				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
42	Persentase kegiatan pembangunan yang terevaluasi & termonitor				95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah sosialisasi yg diselenggarakan				14 Kec	14 Kec	-	-	14 Kec	14 Kec	14 Kec	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
44	Jumlah buku kegiatan pembangunan yang terdistribusi				45 buku	45 buku	-	-	45 Buku	45 buku	45 buku	-	-	-	100%	100%	-	-	-
45	Jumlah buku hasil evaluasi yang terdistribusikan				50 buku	50 buku	-	-	-	50 buku	50 buku	-	-	-	100%	100%	-	-	-
46	Jumlah sosialisasi paket regulasi kegiatan pembangunan pada setiap OPD pada tingkat kabupaten dan Kecamatan				4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 Kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%	100%	100%	100%
47	Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 Kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	8 kali	100%	100%	100%	100%	67%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
48	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah				50 orang	50 orang	40 orang	50 orang	50 Orang	50 orang	50 orang	40 orang	40 orang	30 orang	100%	100%	100%	80%	60%
49	Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku				95 %	97 %	97 %	98 %	100 %	95 %	97 %	97 %	98 %	98 %	100%	100%	100%	100%	98%
50	Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa yang diadakan untuk pengelola kegiatan				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
51	Jumlah Uji Petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa				-	-	10 kali	10 kali	10 Kali	-	-	10 kali	10 kali	10 kali	-	-	100%	100%	100%
52	Jumlah nagari yang dimonev pengelolaan pemnanya				74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	100%	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah Regulasi tentang Penyaluran Pupuk				1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah regulasi ttg alokasi pupuk				1 SK	1 SK	1 SK	2 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	100%	100%	100%	50%	100%
55	Jumlah UMKM yang memperoleh KUR				8.666 UMKM	7.702 UMKM	7.966 UMKM	7.592 UMKM	7.782 UMKM	8.666 UMKM	7.702 UMKM	7.966 UMKM	9.939 UMKM	5.437 UMKM	100%	100%	100%	131%	70%
56	Jumlah UMKM yang memperoleh kredit deposito Pemda pada BPR				232 UMKM	252 UMKM	255 UMKM	290 UMKM	310 UMKM	232 UMKM	252 UMKM	255 UMKM	182 UMKM	60 UMKM	100%	100%	100%	63%	19%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
57	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah/ aparaturnya dalam perkara PTUN dan Perkara Perdata				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
58	Persentase Peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan				100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100%	-	100%	100%	100%
59	Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi :																		
	a. Peraturan Daerah				10 buah	12 buah	14 buah	10 buah	10 Buah	10 buah	12 buah	14 buah	10 buah	8 buah	100%	100%	100%	100%	80%
	b. Peraturan Bupati				50 buah	52 buah	36 buah	50 buah	50 Buah	50 buah	52 buah	36 buah	32 buah	50 buah	100%	100%	100%	64%	100%
	c. Keputusan Bupati				500 buah	735 buah	987 buah	500 buah	500 Buah	500 buah	735 buah	987 buah	759 buah	589 buah	100%	100%	100%	152%	118%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
60	Jumlah Peraturan Bupati ttg Angg Pendpt dan Belanja PDAM dan Persh Daerah SNI				2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	2 perbup	100%	100%	100%	100%	100%
61	Jumlah Keputusan Bupati				2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	100%	100%	100%	100%	100%
62	Persentase camat berkinerja baik				30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	100%	100%	100%	100%	100%
63	Persentase SKPD yang berkinerja Baik				40 %	51 %	80 %	100 %	100 %	40 %	51 %	77,78 %	77,78 %	88,88 %	100%	100%	97%	78%	89%
64	Lapkeu Semesteran yang disampaikan tepat waktu				tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	0%	0%	0%	0%	0%
65	Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu				tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	0%	0%	0%	0%	0%
66	LAKIP Setda bernilai baik				baik	baik	baik	baik	Baik	baik	baik	baik	baik	baik	100%	100%	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
67	Renja disampaikan tepat waktu				tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	tidak tepat waktu	0%	0%	0%	0%	0%
68	LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu				tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100%	0%	100%	100%	100%
69	Nilai LAKIP Kab. Solok				C	C	C	C	C	C	C	C	CC	CC	100%	100%	100%	100%	100%
70	Persentase tersebarnya informasi pembangunan daerah				100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
71	Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan																		
	a. Media Cetak																		
	- jumlah berita				1030 buah	1029 buah	2968 buah	2900 buah	2900 Buah	1030 buah	1029 buah	2968 buah	4163 buah	2612 buah	100%	100%	100%	144%	90%
	- jumlah foto				115 buah	313 buah	350 buah	300 buah	300 Buah	115 buah	313 buah	350 buah	1484 buah	766 buah	100%	100%	100%	495%	255%
	b. Media Elektronik				6 buah	6 buah	12 buah	6 buah	6 Buah	6 buah	6 buah	12 buah	5 buah	11 buah	100%	100%	100%	83%	183%
72	Jumlah media massa yang memuat berita daerah				39 media massa	38 media massa	41 media massa	46 media massa	50 media massa	39 media massa	38 media massa	41 media massa	41 media massa	52 media massa	100%	100%	100%	89%	104%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
73	Jumlah Imam, Khatib, Gharin dan guru mengaji yang diberdayakan				1000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 Orang	1000 orang	1994 orang	1994 orang	2000 orang	2000 orang	100%	100%	100%	100%	100%
74	MTq terlaksana dengan baik				baik	baik	baik	baik	Baik	baik	baik	baik	baik	baik	100%	100%	100%	100%	100%
75	Jumlah pendampingan haji				3 orang	1 orang	1 orang	3 orang	3 Orang	3 orang	1 orang	1 orang	2 orang	1 orang	100%	100%	100%	67%	33%
76	Jumlah wirid yang terlaksana :																		
	a. Mingguan				48 kali	48 kali	96 kali	96 kali	96 Kali	48 kali	48 kali	96 kali	90 kali	88 kali	100%	100%	100%	94%	92%
	b. bulanan				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 Kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
77	Persentase tim ramadhan terlaksana sesuai dengan jadwal				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
78	Persentase mesjid dan mushalla yang diberi bantuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100%	100%	100%	100%	0%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
79	Jumlah Mesjid/Mushola yang melaksanakan didikan subuh				74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	74 mesjid	152 mesjid	100%	100%	100%	100%	205%
80	Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh				80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	80 %	82 %	83 %	84 %	87 %	100%	100%	100%	100%	102%
81	Persentase remaja yang mengikuti wirid remaja				50 %	52 %	53 %	54 %	55 %	50 %	52 %	53 %	54 %	56 %	100%	100%	100%	100%	102%
82	Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggarakan wirid remaja				62 mesjid	63 mesjid	64 mesjid	65 mesjid	66 mesjid	62 mesjid	63 mesjid	64 mesjid	65 mesjid	78 mesjid	100%	100%	100%	100%	118%
83	Jumlah Kegiatan majelis taklim yang melaksanakan BKMT				24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 Kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	40 kali	100%	100%	100%	100%	167%
84	Jumlah KK yang mendapat raskin				23.753 KK	23.753 KK	22.828 KK	22.828 KK	22.828 KK	23.753 KK	23.753 KK	22.828 KK	22.828 KK	22.828 KK	100%	100%	100%	100%	100%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
85	Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
86	Persentase anak miskin berprestasi yang diberi bantuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
87	Persentase masyarakat miskin yang diberi bantuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
88	Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah				-	-	-	4.400 KK	600 KK	-	-	-	4.000 KK	4.000 KK	-	-	-	91%	667%
89	Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari				-	65 kali	74 kali	148 kali	148 Kali	-	65 kali	74 kali	74 kali	42 kali	-	100%	100%	50%	28%
90	Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari				-	-	14 nagari	14 nagari	14 nagari	-	-	14 nagari	14 nagari	11 nagari	-	-	100%	100%	79%

No	indikator kinerja Program (outcome dan Kegiatan (out Put)	Target SPM	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
91	Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib mengaji dan jumat hening						14 nagari	14 nagari	14 nagari			14 nagari	14 nagari	11 nagari	-	-	100%	100%	79%
92	Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI				-	-	2 kali	2 kali	2 Kali	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	100%	100%	100%
93	Regulasi Pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya				-	-	1 perda	-	-	-	-	1 perda	-	-	-	-	100%	-	-

Berdasarkan capaian kinerja yang tergambar dalam tabel tersebut diatas, maka terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai secara 100 % sebagai berikut :

1. Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan, tercapai pada akhir periode sebesar 50 %.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2015, secara realisasi, terjadi kemerosotan jumlah lokasi yang dibebaskan yang disebabkan karena pengurusan alas hak yang terkendala di nagari.

2. Jumlah Penerima Sosialisasi, tercapai pada akhir periode sebesar 44 %

Hal ini terjadi karena adanya pengurangan target jumlah peserta sosialisasi, dengan target sasaran yang berbeda pada setiap tahunnya.

3. Jumlah ruang yang berfungsi *e-office* nya, tercapai pada akhir periode sebesar 0 %

Pada tahun 2013 target untuk kegiatan ini belum bisa terlaksana karena masih dalam masa transisi antara pengelolaan surat secara manual menuju basis elektronik meskipun program dan peralatan pendukungnya telah disiapkan, sedangkan pada tahun 2014, aplikasi *e office* dimaksud sudah dikembangkan sebagaimana yang diharapkan. Dengan dukungan ketersediaan jaringan wifi di Sekretariat Daerah, maka seluruh bagian telah terkoneksi dan bisa mengakses aplikasi *e office* dengan baik namun memang belum termanfaatkan dalam administrasi persuratan harian karena sosialisasinya direncanakan terlaksana pada tahun 2015. Namun karena kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak, maka target 16 ruang dapat berfungsi *e-office* nya, yang telah ditetapkan diawal tahun, tidak dapat terlaksana, karena pengalihan anggaran.

4. Jumlah dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah, tercapai pada periode akhir sebesar 0 %

Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 tidak adanya MoU yang dihasilkan, sebab sebuah kesepakatan diperoleh dibentuk atas kesamaan persepsi dan pandangan antara dua belah pihak dan yang paling penting, kesepakatan dimaksud dapat memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat dan Pemerintah Kabupaten Solok

5. Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah, tercapai pada akhir periode sebesar 60 %

Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan. Penurunan ini terjadi karena sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh beberapa anggota ULP telah habis masa berlakunya sehingga secara otomatis tidak dapat lagi ditunjuk menjadi anggota ULP, disamping itu juga dikarenakan ada beberapa anggota ULP yang melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tercapai pada akhir periode sebesar 98 %

Hal ini terjadi karena adanya perubahan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa oleh beberapa SKPD yang otomatis akan mempengaruhi capaian indikator ini

7. Jumlah UMKM yang memperoleh KUR, tercapai pada akhir periode sebesar 70 %

Hal ini terjadi karena adanya moratorium diawal tahun dari pusat, dan baru dimulai lagi pada bulan September 2015, sehingga realisasi 4 bulan terakhir ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

8. Jumlah UMKM yang memperoleh kredit deposito Pemda pada BPR, tercapai pada akhir periode sebesar 19 %

Hal ini terjadi karena dalam masa pelaksanaan, ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga dihentikan ditengah jalan.

9. Persentase SKPD yang berkinerja Baik, tercapai pada akhir periode sebesar 89%

Hal ini terjadi karena dari 27 SKPD yang dinilai terdapat 4 SKPD berkinerja amat baik atau sama dengan 14,81 %, 20 SKPD berkinerja baik atau sama dengan 74,07 %, dan 3 SKPD berkinerja cukup atau sama dengan 11,11 %

10. Lapkeu semesteran yang disampaikan tepat waktu, tercapai pada akhir periode sebesar 0 %

Hal ini disebabkan karena belum taatnya pengelola keuangan (terutama Bendahara) pada aturan yang berlaku dalam hal ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ. Salah satu penyebabnya adalah karena seringnya spj yang disampaikan dikembalikan lagi karena kesalahan. Dan memang dari 12 bendahara yang ada pada Sekretariat Daerah, sebagian besar tidak mempunyai ilmu keuangan pemerintahan yang berasal dari pendidikan khusus keuangan yang diadakan oleh Pemerintahan, sehingga mereka bekerja hanya secara autodidak

11. Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu, tercapai pada akhir periode sebesar 0%

Sama hal nya dengan penyebab dari keterlambatan laporan semesteran

12. Renja disampaikan tepat waktu, tercapai pada akhir periode sebesar 0%

Hal ini terjadi karena renja Sekretariat Daerah terlambat disampaikan, dan ini berkaitan dengan kecepatan laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja untuk tahun yang akan datang.

13. Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari, tercapai pada akhir periode sebesar 28 %

Hal ini terjadi karena kurang siapnya nagari dalam pelaksanaan MTTS di nagarinya masing-masing

14. Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari, tercapai pada akhir periode sebesar 79 %

Hal ini terjadi karena ditahun 2015 jumlah nagari yang dijadikan tempat pelaksanaan ABS SBK tersebut hanya berjumlah 11 nagari, karena ada tiga kecamatan yang jumlah Nagarinya hanya 2 nagari

15. Jumlah Nagari yang menerbitkan Peraturan Nagari Magrib mengaji dan jumat hening,tercapai pada akhir periode sebesar 79 %

Hal ini terjadi karena ditahun 2015 jumlah nagari yang dijadikan tempat pelaksanaan ABS SBK tersebut hanya berjumlah 11 nagari, karena ada tiga kecamatan yang jumlah Nagarinya hanya 2 nagari.

Dari segi pendanaan, baik anggaran maupun realisasinya, kinerja keuangan Sekretariat Daerah pada periode tahun 2011 – 2015 dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah
Tahun 2011 - 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
- BTL	111.410.954.985	103.882.828.866	93,24%
- BL	5.081.635.067	3.714.395.600	73,09%
Belanja Barang dan Jasa	108.008.551.411	96.092.578.140	88,97%
Belanja Modal	33.920.089.960	24.676.734.763	72,75%
Total	258.421.231.423	228.366.537.369	88,37%

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk belanja adalah sebesar Rp.258.421.231.423 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.111.410.954.985 (43,11%) dan belanja langsung sebesar Rp.147.010.276.438 (56,89%). Dari anggaran dimaksud, dapat direalisasi sebesar Rp.228.366.537.369 (88,37%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 103.882.828.866 (93,24%) dan belanja langsung sebesar Rp. 124.483.708.503 (84,68%).

Secara lengkap kinerja keuangan Sekretariat Dearah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Solok

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pegawai																	
- BTL	21.123.501.930	21.123.770.750	22.196.909.575,5	23.500.148.350	23.466.624.379	18.463.814.585	20.281.225.340	21.832.276.168	20.957.291.800	22.348.220.973	87,41 %	96,01 %	98,36 %	89,18 %	95,23 %	2,13 %	3,89 %
- BL	638.135.700	882.145.141	1.064.804.026	1.170.206.000	1.326.344.200	554.936.100	723.000.000	75.500.000	1.124.099.000	1.236.860.500	86,96 %	81,96 %	7,09 %	96,06 %	93,25 %	15,76 %	17,39 %
Belanja Barang & Jasa	16.878.533.476	18.599.172.309	22.466.864.024	25.041.335.800	25.022.645.802	14.760.099.336	16.636.814.405	20.429.855.417	22.309.892.072	21.955.916.910	87,45 %	89,45 %	90,93 %	89,09 %	87,74 %	8,19 %	8,27 %
Belanja Modal	6.866.517.000	7.970.721.000	6.835.106.450	4.338.095.510	7.909.650.000	3.611.792.700	6.691.872.116	6.507.398.704	4.005.309.940	3.860.361.303	52,60 %	83,96 %	95,21 %	92,33 %	48,81 %	2,87 %	1,34 %
JUMLAH	45.506.688.106	48.575.809.200	52.563.684.075,5	54.049.785.660	57.725.264.381	37.390.642.721	44.332.911.861	48.845.030.289	48.396.592.812	49.401.359.686	82,17 %	91,27 %	92,93 %	89,54 %	85,58 %	4,87 %	5,73 %

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Perwujudan *good governance* merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Implementasi pencapaian *good governance* tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan aspiratif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menuntut setiap instansi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, masih dijumpai beberapa hambatan berupa:

1. kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang;
2. belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. rendahnya disiplin aparatur;
4. sistem tata kelola persuratan dan kearsipan yang belum memenuhi syarat;
5. belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data/informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan;

6. belum efektif dan efesiennya pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
7. belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dan media informasi dalam penyampaian program kegiatan SKPD kepada masyarakat;
8. belum optimalnya penerapan ABS-SBK; dan
9. belum optimalnya fasilitasi dan pemahaman SKPD terhadap proses penyusunan produk hukum daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokoknya perlu bersinergi dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Solok dalam skala yang lebih luas. Perencanaan periode 2016-2021 merupakan periode dimana telah terjadi suksesi kepemimpinan melalui ajang pemilukada yang berlangsung secara demokratis. Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis, berkewajiban mendukung perwujudan visi, misi, agenda dan tujuan daerah yang telah dirumuskan.

Adapun visi, misi, agenda dan tujuan pemerintah Kabupaten Solok lima tahun kedepan adalah:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Kabupaten Solok meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-

batas yang telah ditetapkan. Maju artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan. Mandiri artinya masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan yang sehat. Sedangkan Kehidupan Masyarakat Madani adalah masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, kareakter dan mental sesuai dengan filosofi **“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**

Untuk mewujudkan visi, diperlukan beberapa misi dalam pencapaiannya, dimana misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi ini merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mensukseskan Program Wajib Belajar (wajib) 12 Tahun;
2. meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat;
3. meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi **“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**; dan
5. memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Visi dan misi yang telah dijelaskan diatas disimpulkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan. Empat pilar pembangunan dan prioritas pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan

NO	PILAR PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	Pendidikan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan
		2. Peningkatan kualitas dan pemetaan Pendidikan
2.	Kesehatan	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		4. Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
3.	Ekonomi Kerakyatan	5. Pengembangan pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya
		6. Penguatan kedaulatan pangan
		7. Peningkatan insfrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi
		8. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	9. Membangun karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintahan Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan
		10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung visi, misi, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Solok membutuhkan sumber daya aparatur yang kompeten, berkomitmen kuat dan kapabel serta didukung dengan ketersediaan sarana

dan prasarana yang lebih baik, termasuk juga sistem kerja yang efisien dan efektif

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada Sekretariat Daerah dan berdasarkan visi, misi agenda dan tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah rencana strategis pada Sekretariat Daerah untuk lima tahun kedepan, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok, yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

Bercermin pada kekurangan yang terdapat pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, maka dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program /kegiatan pada meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, peningkatan pemberian bimbingan teknis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan, penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

3.4 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan

program /kegiatan pada hal berikut ini:

1. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti melengkapi peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan media masa;
2. peningkatan pemberian bimbingan teknis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja;
3. penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan; dan
4. penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH

VISI :

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, *Good Governance*(Kpemerintahan Yang Baik)Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3). *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

1. partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya;

2. aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia;
3. transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan;
4. responsif, yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*;
5. *consensus orientation*, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur;
6. efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin;
7. akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*; dan
8. *strategic vision*, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Solok menetapkan misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. mewujudkan masyarakat berkarakter dengan filosofi ABS-SBK; dan
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat.

Kesinambungan antara visi dan misi kabupaten dengan visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
 Hubungan Visi dan Misi Kabupaten
 dengan
 Visi dan Misi Sekretariat Daerah

VISI KAB SOLOK	VISI SETDA
terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri menuju Kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri menuju Kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara', syara' basandi kitabullah
MISI KAB. SOLOK	MISI SETDA
1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun	3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat	
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”	2. Mewujudkan masyarakat berkarakter dengan filosofi ABS-SBK
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah;
 - b. meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan kecamatan;
 - c. meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan nagari; dan
 - d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergistas program-program penanggulangan kemiskinan.
2. menata Produk Hukum Daerah dan membangun Budaya Taat Hukum.
Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah:
 - a. terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b. terwujudnya masyarakat taat hukum.
3. mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah:
 - a. meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - b. menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Rumusan tujuan yang hendak dicapai atas misi yang disampaikan sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
 Hubungan antara Misi dan Tujuan Sekretariat Daerah

MISI	TUJUAN
1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
	2. Menata Produk Hukum Daerah dan membangun Budaya Taat Hukum
	3. Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
	4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama
	5. Melaksanakan pengendalian pengadaan barang dan jasa
	6. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
2. Mewujudkan masyarakat berkarakter dengan filosofi ABS-SBK	7. Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat	8. Meningkatkan kualitas SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat

Dan selanjutnya, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
 Hubungan Tujuan dengan Sasaran Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
	3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari
	4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergistas program-program penanggulangan kemiskinan
2. Menata Produk Hukum Daerah dan membangun Budaya Taat Hukum	5. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
	6. Terwujudnya masyarakat taat hukum
3. Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	7. Meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
	8. Menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD
	9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

TUJUAN	SASARAN
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama	11. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah
5. melaksanakan pengendalian pengadaan barang dan jasa	12. Meningkatkan pengendalian pengadaan Barang dan jasa
6. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	13. Meningkatnya penatausahaan sekretariat daerah
7. Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah	14. Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK
	15. Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat
8. Meningkatkan kualitas SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat	16. Meningkatkan kualitas SDM
	17. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi urusan kesehatan
	18. Berkembangnya ekonomi kreatif
	19. Terbinanya BUMD

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana /instrumen pengukuran, dengan jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai LPPD
	2. Penilaian SKPD berkinerja Baik
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	3. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	4. Jumlah nagari yang melaksanakan Tertib Administrasi nagari
	5. Peningkatan SDM Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergistas program-program penanggulangan kemiskinan	6. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemerintahan Kabupaten solok
5. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	7. Terfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah
6. terwujudnya masyarakat taat hukum	8. Jumlah sosialisasi produk hukum daerah
7. Meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	9. Persentase jabatan yang dievaluasi
8. Menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD	10. Persentase SKPD yang melaksanakan standar pelayanan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	11. Rata-rata IKM
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12. Nilai evaluasi SAKIP setda
	13. Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten
11. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	14. Jumlah kerjasama
12. Meningkatkan pengendalian pengadaan Barang dan jasa	15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya
	16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
13. Meningkatnya penatausahaan sekretariat daerah	17. Tingkat tertib pengelolaan barang/aset daerah
	18. Prosentase temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti
14. Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	19. Mesjid Aktif
	20. Mesjid Paripurna
15. Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	21. Kelembagaan adat dan pemangku adat yang berdaya
16. Meningkatkan kualitas SDM	22. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan
17. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi urusan kesehatan	23. persentase urusan kesehatan yang difasilitasi & terkoordinir
18. Berkembangnya ekonomi kreatif	24. Jumlah UMKM yang memperoleh KUR
19. Terbinanya BUMD	25. Jumlah Pengembangan BUMD

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah	Nilai LPPD	nilai	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
		Penilaian SKPD berkinerja Baik	Persentase	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan	kecamatan	0	5	10	14	14	14	14	14

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang melaksanakan Tertib Administrasi nagari	nagari	5	5	10	20	10	10	14	74
		Peningkatan SDM Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari	nagari	5	5	10	20	10	10	14	74
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergistas program-program penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemerintahan Kabupaten solok	jumlah	0	1	1	1	1	1	1	6

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menata Produk Hukum Daerah dan membangun Budaya Taat Hukum	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	terfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah	perda	8	8	8	8	8	8	8	8
			perbup	20	20	20	20	20	20	20	20
			keputusan bupati	500	500	500	500	500	500	500	500
	terwujudnya masyarakat taat hukum	jumlah sosialisasi produk hukum daerah	kali	1	1	1	1	1	1	1	1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Mengimplementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	persentase jabatan yang dievaluasi	Persentase	0	0	10	10	10	10	10	50
	menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD	persentase SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM	kategori	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7
	meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP setda	kategori	C	C	C	CC	CC	CC	B	B
		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	kategori	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama	meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	jumlah kerjasama	buah	3	3	3	3	3	3	3	3
melaksanakan pengendalian pengadaan barang dan jasa	meningkatkan pengendalian pengadaan Barang dan jasa	Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya	skpd	42	42	42	42	42	42	42	42
		Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	meningkatnya penatausahaan sekretariat daerah	Tingkat tertib pengelolaan barang/aset daerah	Persentase	30	30	40	50	60	70	80	80
		Prosentase temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	88	88	90	90	90	90	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah	meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Mesjid Aktif	%	10	10	20	25	15	15	15	100
		Mesjid Paripurna	%	10	10	20	25	15	15	15	100
	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Kelembagaan adat dan pemangku adat yang berdaya	%	30	30	60	90	10	100	100	100
Meningkatkan kualitas SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat	meningkatkan kualitas SDM	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	orang	5	5	5	5	5	5	5	30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	meningkatkan fasilitasi dan koordinasi urusan kesehatan	persentase urusan kesehatan yang difasilitasi dan terkoordinir	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
	berkembangnya ekonomi kreatif	Jumlah UMKM yang memperoleh KUR	UMKM	7.500	7.500	7.850	8.000	8.150	8.300	8.500	8.500
	terbinanya BUMD	Jumlah Pengembangan BUMD	BUMD	2	2	2	2	2	2	2	2

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Sekretariat Daerah dalam lima tahun kedepan. Strategi disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Secara eksternal dipilih dengan memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga terselenggaranya administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, akuntabel dan transparan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi internal organisasi. Strategi internal diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki Sekretariat Daerah untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada, yang secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penataan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah melalui pengukuran dan analisis beban kerja;
- b. penataan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik melalui pembenahan regulasi, penyediaan sarana dan prasarana dan aparatur yang kompeten, komit dan kapabel;
- c. penataan dan penyempurnaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur melalui peningkatan manajemen kepegawaian, budaya organisasi serta iman dan taqwa.

Selanjutnya Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan diuraikan pada tabel berikut ini sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Solok 2016 - 2021 :

Tabel 4.6
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Sekretariat Daerah**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
	Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	Mendorong nagari untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Peningkatan sinergitas dengan lembaga lainnya

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya masyarakat taat hukum		Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM
Meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
Menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD	Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien	Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pemda mpingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik	
	Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan	
	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Melaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP	Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Lakip)
	Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	
	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD di Kabupaten Solok secara berkala	
	Memberikan reward dan Punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD	
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian dan LPNK serta Instansi Pemerintahan lainnya	Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah;
	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia dan APEKSI	Seluruh SKPD dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib mematuhi Peraturan Daerah
	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah	Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
	Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	
	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan	
	Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemkab solok	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengendalian pengadaan Barang dan jasa	Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala pada 42 SKPD	Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan / semester dan tahunan)
Meningkatnya penatausahaan sekretariat daerah	Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang	Penerapan Standar akuntansi Pemerintah
	Efektifitas kinerja penatausahaan internal	
	Optimalisasi pelayanan penatausahaan SKPD	
Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dg ABS-SBK	Meningkatkan fungsi dan aktivitas mesjid	Peningkatan Kegiatan keagamaan
Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan pemangku adat	Memperkuat kelembagaan KAN sebagai pendukung utama Nagari Adat
Meningkatkan kualitas SDM	Mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten solok maupun diluar kab.solok	
Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi urusan kesehatan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif	
Berkembangnya ekonomi kreatif		
Terbinanya BUMD	Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi makro	Penyempurnaan regulasi
	Memfasilitasi dan mengapresiasi kegiatan Stakeholder dalam pengembangan ekonomi	Formulasi kebijakan
	Monitoring dan Evaluasi hasil ProgramKegiatan bidang ekonomi sebagai bahan kebijakan selanjutnya	

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kesuksesan pencapaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh SKPD dalam menjalankan Program dan kegiatan yang ada. Salah satu SKPD dimaksud adalah Sekretariat Daerah yang turut serta dalam mewujudkan capaian target RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok dengan menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan yang ada.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara sistem operasional dengan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2016-2021.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya *reviu rencana strategis* oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil *reviu renstra* menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2016–2021 di lingkungan Setda Kabupaten Solok sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatk an Penyelengg aaran Pemerintah an Umum dan Otonomi Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD		Perencanaan Pembangunan Daerah															
				Koordinasi Penyusutan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ)	LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu dan bernilai sedang	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	200.000.000	Tepat waktu dan bernilai sedang	1.200.00 0.000
				Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
				Peringatan Hari Jadi dan HUT RI	Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI	2 kali	60.000.000	2 kali	60.000.000	2 kali	60.000.000	2 kali	60.000.000	2 kali	60.000.000	2 kali	60.000.000	2 kali	360.000. 000
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat	90 %	189.825.000	90 %	220.000.000	90 %	250.000.000	90 %	280.000.000	90 %	310.000.000	90 %	350.000.000	90 %	1.599.825.000
				Kerjasama Informasi dan Media Massa															
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah publikasi Acara Daerah		2.951.500.000		3.050.000.000		3.100.000.000		3.160.000.000		3.200.000.000		3.260.000.000		18.721.500.000
					a. Media Cetak														
					- jumlah berita	2900 buah		2900 buah		2900 buah		2900 buah		2900 buah		2900 buah		17.400 buah	
					- jumlah foto	300 buah		300 buah		300 buah		300 buah		300 buah		300 buah		1.800 buah	
					b. Media Elektronik	6 buah		6 buah		6 buah		6 buah		6 buah		6 buah		6 buah	
					Jumlah media massa yang memuat berita daerah	46 media massa		46 media massa		46 media massa		46 media massa		46 media massa		46 media massa		46 media massa	
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Protokol	Persentase acara-acara daerah terfasilitasi	100 %	189.300.000	100 %	210.000.000	100 %	220.000.000	100 %	240.000.000	100 %	270.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.429.300.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Penilaian SKPD berkinerja Baik		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
				Penataan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang berkinerja Baik	85 %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %	
					Jumlah SKPD yang menyampaikan TAPKIN tepat waktu	42 SK PD		42 SK PD		42 SK PD		42 SK PD		42 SK PD		42 SKPD		42 SKPD	
				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur															
				Penataan Administrasi Kepegawaian	Persentase File Pegawai yang tertata dan tersusun	100 %	33.300.000	100 %	33.300.000	100 %	33.300.000	100 %	33.300.000	100 %	33.300.000	100 %	33.300.000	100 %	199.800.000
					Persentase terlayani urusan kepegawaian	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah Kecamatan yangmelaksanakan TertibAdministrasi Kecamatan		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah camat yang dimonev kinerjanya	14 orang	60.000.000	14 orang	60.000.000	14 orang	60.000.000	14 orang	60.000.000	14 orang	60.000.000	14 orang	60.000.000	14 orang	360.000.000
					Jumlah pelaksanaan kompetensi camat	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yangmelaksanakan TertibAdministrasi nagari		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari															
		Peningkatan SDM Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari		Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dimonev pengelolaan adm pemnanya	74 nagari	400.000.000	74 nagari	400.000.000	74 nagari	400.000.000	74 nagari	400.000.000	74 nagari	400.000.000	74 nagari	400.000.000	74 Nagari	2.400.000.000
					Jumlah pelaksanaan kompetensi Wali Nagari Seknag, dan Ketua KAN	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali	
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergistas program-program penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemerintahan Kabupaten solok		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Peningkatan KualitasSDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
					Persentase monev raskin yang terlaksana	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Menata Produk Hukum Daerah dan membangun Budaya Taat Hukum	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan	terfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
				Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku JDIH Kab. Solok yang tersusun	120 buk u	238.220.000	120 buk u	250.000.000	120 buk u	260.000.000	120 buk u	265.000.000	120 buk u	270.000.000	120 buk u	275.000.000	720 buku	1.558.220.000
					Jumlah lembaran Daerah Kab. Solok yang tersusun	120 buk u		120 buk u		120 buk u		120 buk u		120 buk u		120 buk u		720 buku	
	terwujudnya masyarakat taat hukum	jumlah sosialisasi produk hukum daerah			Jumlah CD kumpulan Produk hukum yang dicetak	500 kepi ng											500 keping		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Kajian Peraturan Per-UU-an Daerah Terhadap Per-UU-an yang baru, lebih tinggi dan Per-UU-an Daerah Keserasian antara peraturan	Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi :		390.500.000		400.000.000		420.000.000		420.000.000		430.000.000		440.000.000		2.500.500.000
					a. Peraturan Daerah	8 buah		8 buah		8 buah		8 buah		8 buah		8 buah		48 buah	
					b. Peraturan Bupati	20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		120 buah	
					c. Keputusan Bupati	500 buah		500 buah		500 buah		500 buah		500 buah		500 buah		3.000 buah	
					Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan legal drafting	36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang		36 orang	
					Jumlah Peraturan Nagari yang diharmonisasi	148 buah		148 buah		148 buah		148 buah		148 buah		148 buah		888 buah	
				Penataan Peraturan Perundang-undangan															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah, aparaturnya dalam perkara PTUN dan Perkara Perdata	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	290.000.000	100 %	290.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.740.000.000
Mengimple mentasikan Reformasi Birokrasi dalam Penyeleng garaan Pemerintah an	Meningkatkan SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	persentase jabatan yang dievaluasi		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
				Penataan Reformasi Birokrasi	persentase jabatan yang dievaluasi	3,20	840.570.000	3,30	850.000.000	3,40	850.000.000	3,50	850.000.000	3,60	850.000.000	3,70	850.000.000	3,70	5.090.570.000
					Jumlah peserta bimtek anjab dan ABK	28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 orang	
					Jumlah Dokumen Anjab dan ABK SKPD yang disusun	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		30 dokumen	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	menerapkan standar pelayanan dan SOP di SKPD	persentase SKPD yang melaksanakan standar pelayanan		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
				Penataan Reformasi Birokrasi	persentase SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %	
					Jumlah SKPD yang dievaluasi SOP nya	42 skpd		42 skpd		42 skpd		42 skpd		42 skpd		42 skpd		42 SKPD	
					Jumlah Perda OPD yang tersusun	1 dokumen		-		-		-		-		-		1 dokumen	
	meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM			Indek survey IKM	3,20	840.570.000	3,30	850.000.000	3,40	850.000.000	3,50	850.000.000	3,60	850.000.000	3,70	850.000.000	3,70	5.090.570.000
	meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP setda		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapkeu Semesteran yang disampaikan tepat waktu	tepat waktu	36.913.570	tepat waktu	40.000.000	tepat waktu	45.000.000	tepat waktu	50.000.000	tepat waktu	55.000.000	tepat waktu	60.000.000	Tepat waktu	286.913.570

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		Tepat waktu	
					LAKIP Setda bernilai baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
					LAKIP Kabupaten bernilai C	C		C		C		C		C		C		C	
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama	meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	jumlah kerjasama		Program Kerjasama Pembangunan															
				Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kerjasama antar daerah dan badan hukum	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	720.000.000
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
				Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Rapat Koordinasi Pejabat Daerah	Jumlah Rapat Muspida yang diadakan	12 kali	500.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	500.000.000	72 kali	3.000.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah Rakor Pemda & Pemprop yang diadakan	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali	
melaksanakan pengendalian pengadaan barang dan jasa	meningkatkan pengendalian pengadaan Barang dan jasa	Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
		Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP		Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah	30 orang	669.000.000	30 orang	1.000.000.000	30 orang	1.000.000.000	30 orang	1.000.000.000	30 orang	1.000.000.000	30 orang	1.000.000.000	30 orang	5.669.000.000
					Jumlah Pengadaan barang/jasa yang terlaksana di ULP dan LPSE	200 paket		200 paket		200 paket		200 paket		200 paket		200 paket		1.200 paket	
					Jumlah Pengadaan Barang/jasa dalam menunjang operasional proses pengadaan barang/jasa	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		6 paket	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah Uji Petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		60 kali	
					Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa bagi pengelola kegiatan	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali	
					Jumlah peserta bimtek pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa			30 orang		30 orang								60 orang	
				Penyusunan SPM dan SOP															
				Peningkatan Standar Pelayanan Penyediaan Jasa Kontruksi	Jumlah Sosialisasi evaluasi pengadaan barang/jasa bagi penyedia jasa konstruksi	1 kali	169.850.000	1 kali	275.000.000	1 kali	300.000.000	1 kali	325.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	6 kali	1.769.850.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja rekanan	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		6 kali	
					Jumlah penanggung jawab pelaksana jasa konstruksi yang dibimtekkan	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	
					Jumlah peserta pelaksanaan SMM/SMK3			30 orang				30 orang				30 orang		90 orang	
					Jumlah tukang yang dilatih			30 orang		30 orang								60 orang	
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
				Evaluasi Monitoring dan Penilaian Kinerja Prog. Pemb	Jumlah Pengawas lapangan yang dibimtekkan	40 orang	384.619.500	-	500.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	700.000.000	-	700.000.000	40 orang	3.534.619.500
					Jumlah rapat koordinasi dan rapat evaluasi seluruh SKPD dan kecamatan	8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah paket pekerjaan yang terkoordinasi dan diserahkan terimakan pekerjaannya	800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		4.800 paket	
					Jumlah paket pekerjaan yang terlaksana pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan nya	800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		800 paket		4.800 paket	
					Jumlah paket pekerjaan yang dimonitoring	50 paket		60 paket		60 paket		65 paket		65 paket		70 paket		370 paket	
					Jumlah Pengelola kegiatan yang dibimtekkan	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	
					Jumlah nagari yang dibimtek PBJ kan personil kecamatannya	-		14 Kecamatan		14 Kecamatan		-		-		-		14 kec	
					Jumlah Kasi Ekbang kecamatan yang diBimtekkan	-		14 orang		14 orang		-		-		-		14 orang	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah TPK Nagari yang dibimtekkan	-		225 ora ng		225 ora ng		-		-		-		225 orang	
					Jumlah Nagari yang dibina pelaksanaan kegiatan di Nagari nya	-		74 Na gari		74 Na gari		74 Na gari						74 Nagari	
mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	meningkatnya penatausahaan sekretariat daerah	Tingkat tertib pengelolaan barang/aset daerah		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah															
				Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah	Persentase lokasi tanah yang telah dibebaskan	100 %	3.257.650.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.500.000.000	100 %	4.500.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	22.257.650.000
				Penyelesaian konflik-konflik pertanahan															
				Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasikan	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	50.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	295.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah															
				Penataan Kekuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lokasi tanah yang sedang diproses BPN untuk disertifikatkan	100 %	312.625.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	100 %	700.000.000	100 %	2.962.625.000
				Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah															
				Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah sosialisasi sistem ttg pendaftaran tanah yang terlaksana	1 kali	3.462.500	2 kali	70.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	80.000.000	2 kali	90.000.000	2 kali	100.000.000	11 kali	418.462.500
				Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum															
				Memfasilitasi Acara - acara Daerah	Persentase acara-acara daerah terfasilitasi	100 %	1.226.500.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	8.726.500.000
				Program Pelayanan Adm Perkantoran															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Prosentase temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya adm perkantoran	100 %	4.763.733.642	100 %	4.800.000.000	100 %	4.800.000.000	100 %	4.800.000.000	100 %	4.800.000.000	100 %	4.800.000.000	100 %	33.563.733.642
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
				Dialog/Audien dengan Tokoh-tokoh Masy, Pimpinan/Angg. Org.Sosial dan Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya dialog	100 %	98.000.000	100 %	98.000.000	100 %	98.000.000	100 %	98.000.000	100 %	98.000.000	100 %	98.000.000	100 %	588.000.000
				Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya inspeksi	100 %	116.675.000	100 %	116.675.000	100 %	116.675.000	100 %	116.675.000	100 %	116.675.000	100 %	116.675.000	100 %	700.050.000
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Persentase terlaksananya koordinasi	100 %	499.000.000	100 %	499.000.000	100 %	499.000.000	100 %	499.000.000	100 %	499.000.000	100 %	499.000.000	100 %	2.994.000.000
				Kunjungan Kerja Kepala Daerah ke Luar Daerah	Persentase terlaksananya kunjungan ke Luar Daerah	100 %	455.000.000	100 %	455.000.000	100 %	455.000.000	100 %	455.000.000	100 %	455.000.000	100 %	455.000.000	100 %	2.730.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
				Pembangunan Rumah Jabatan	Persentase bangunan yang terbangun sesuai rencana	100 %	55.000.000	100 %	100.000.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	155.000.000
				Pengadaan Mobil Jabatan	Persentase Mobil Jabatan yang tersedia sesuai rencana	100 %	2.000.000.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	2.000.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase perlengkapan rumah jabatan yang dapat tersedia sesuai rencana	100 %	1.892.274.900	100 %	2.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	8.692.274.900
				Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase peralatan rumah jabatan yang dapat tersedia sesuai rencana	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	4.800.000.000
				Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Persentase terpeliharanya rumah jabatan sesuai rencana	100 %	332.000.000	100 %	332.000.000	100 %	332.000.000	100 %	332.000.000	100 %	332.000.000	100 %	332.000.000	100 %	1.992.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase terpeliharanya mobil jabatan sesuai rencana	100 %	538.000.000	100 %	538.000.000	100 %	538.000.000	100 %	538.000.000	100 %	538.000.000	100 %	538.000.000	100 %	3.228.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sesuai rencana	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	630.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai rencana	100 %	3.841.805.000	100 %	3.841.805.000	100 %	3.841.805.000	100 %	3.841.805.000	100 %	3.841.805.000	100 %	3.841.805.000	100 %	23.050.830.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terehabnya sarana dan prasarana sesuai rencana	100 %	1.191.900.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	6.191.900.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana	100 %	3.880.373.440	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	23.880.373.440
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase tersedianya pakain dinas beserta kelengkapannya	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	612.000.000
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase tersedianya pakain kerja lapangan	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	156.000.000
				Pengadaan Pakaian KORPRI	Persentase tersedianya pakain KORPRI	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	36.000.000
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase tersedianya pakain khusus hari-hari tertentu	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	798.000.000
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin pegawai	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	240.000.000
Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparaturn Pemerintah Daerah	meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Mesjid Aktif		Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															
		Mesjid Paripurna		Peningkatan Syiar-syiar Islam di masyarakat	Jumlah Nagari yang berkembang didikan subuhnya	74 Nagari	100.000.000	74 Nagari	100.000.000	74 Nagari	100.000.000	74 Nagari	100.000.000	74 Nagari	100.000.000	74 Nagari	100.000.000	74 nagari	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh	84 %		84 %		84 %		84 %		84 %		84 %		84 %	
				Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															
				Peningkatan Syiar-syiar Islam di masyarakat	persentase remaja yang mengikuti wirid remaja	54 %	1.200.000.000	54 %	1.648.642.480	60 %	1.200.000.000	62 %	1.200.000.000	64 %	1.200.000.000	66 %	1.200.000.000	66 %	7.648.642.480
					jumlah mesjid/mushola yang menyelenggarakan wirid remaja	65 mesjid		67 mesjid		67 mesjid		68 mesjid		68 mesjid		70 mesjid		70 mesjid	
					Jumlah wirid yang terlaksana :														
					a. Mingguan	88 kali		88 kali		88 kali		88 kali		88 kali		88 kali		528 kali	
					b. bulanan	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		72 kali	
					Jumlah Kegiatan majelis taklim yang melaksanakan BKMT	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		144 kali	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah Mesjid yang dikunjungi oleh tim ramadhan	54 mesjid		54 mesjid		54 mesjid		54 mesjid		54 mesjid		54 mesjid		54 mesjid	
					Jumlah pendampingan haji	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		12 orang	
					Jumlah pengurus mesjid yang dilatih ttg penataan manajemen mesjid	148 orang		148 orang		148 orang		148 orang		148 orang		148 orang		148 orang	
					Mesjid Aktif	10 %		20 %		25 %		15 %		15 %		15 %		100 %	
					Mesjid Paripurna	10 %		20 %		25 %		15 %		15 %		15 %		100 %	
				Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															
				Peningkatan Syiar-syiar Islam di masyarakat	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang melaksanakan MTQ	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	1.000.000.000	14 Kecamatan	6.000.000.000
						74 nagari		74 nagari		74 nagari		74 nagari		74 nagari		74 nagari		74 nagari	
					Jumlah Dewan Hakim yang dilatih	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		600 orang	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															
				Peningkatan Syiar-syiar Islam di masyarakat	Jumlah Imam, Khatib, Garin dan guru mengaji yang diberikan insentif	2000 orang	1.500.000.000	2000 orang	1.600.000.000	2000 orang	5.531.000.000	2000 orang	5.509.000.000	2000 orang	5.487.000.000	2000 orang	5.465.000.000	12.000 orang	25.092.000.000
				Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial															
				Peningkatan KualitasSDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah	5.000 KK	81.357.520	5.000 KK	81.357.520	5.000 KK	81.357.520	5.000 KK	81.357.520	5.000 KK	81.357.520	5.000 KK	81.357.520	30.000 KK	488.145.120
					Jumlah Ormas Islam yang terbina	8 Ormas	270.000.000	8 Ormas	270.000.000	8 Ormas	270.000.000	8 Ormas	270.000.000	8 Ormas	270.000.000	8 Ormas	270.000.000	8 ormas	1.620.000.000
	Penguatan kelembagaan adaT dan pemangku adat	Kelembagaan adat dan pemangku ada yang berdaya		Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															
				Mengoptimalkan Implementasi ABS-SBK sebagai Filosofi Masyarakat Minangkabau	Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari	13 nagari	1.371.325.000	12 nagari	2.570.000.000	11 nagari	2.800.000.000	-	2.800.000.000	-	2.800.000.000	-	2.800.000.000	36 nagari	15.141.325.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib mengaji dan jumat hening	13 nagari		12 nagari		11 nagari		-		-		-		36 nagari	
					Jumlah peserta Bimtek implementasi ABS-SBK							50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
					Jumlah Nagari yang dilatih tentang Penguatan ABS-SBK			74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 nagari	
					Jumlah Nagari yang diregenerasikan calon pemangku adat salingka Nagari nya			74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 Nagari		74 nagari	
					Jumlah Nagari yang menerbitkan/ membuatkan buku pidato adat	-		-		12 nagari		12 nagari		12 nagari		12 nagari		48 nagari	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Jumlah Nagari yang menerbitkan/m embuatkan buku pelestarian/pe mbudayaan pakaian adat	-		-		12 nag ari		12 nag ari		12 nag ari		12 nag ari		48 nagari	
Meningkatkan kualitas SDM, derajat Kesehatan serta membuka peluang dan akses perekonomian masyarakat	meningkatkan kualitas SDM	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	12 ora ng	252.630.000	12 ora ng	260.000.000	12 ora ng	260.000.000	12 ora ng	260.000.000	12 ora ng	270.000.000	12 oran g	270.000.000	72 orang	
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH															
	meningkatkan fasilitasi dan koordinasi urusan kesehatan	persentase urusan kesehatan yang difasilitasi dan terkoordinir		Peningkatan Nilai-nilai Agama dan Kebudayaan															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Peningkatan KualitasSDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah pengelola UKS nya yang dilatih	112 ora ng	310.000.000	112 ora ng	556.000.000	112 ora ng	409.000.000	112 ora ng	470.000.000	112 ora ng	540.000.000	112 oran g	540.000.000	112 orang	2.825.00 0.000
					Jumlah sekolah yang mengikuti lomba UKS tingkat Kabupaten Solok	56 sek olah		56 sek ola h		56 sek ola h		56 sek ola h		56 sek ola h		56 sek olah		56 sekolah	
					Pembangunan Kantor UKS Kabupaten Solok			1 bua h										1 buah	
					Persentase terlaksananya koordinasi pelaksanaan UKS di Kabupaten Solok	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	berkembangnya ekonomi kreatif			Pengembangan Sistem Pendukung UMKM															
				Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah P-LDPM yang memperoleh bantuan	2 per usa haa n	80.000.000	2 per usa haa n	80.000.000	2 per usa haa n	85.000.000	2 per usa haa n	85.000.000	2 per usa haa n	90.000.000	2 peru saha aan	100.000.000	12 perusaha an	520.000. 000
					Jumlah Rapat Koordinasi	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		18 kali	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					Evaluasi dan Monitoring PLDPM, Gapoktan	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		12 kali	
				Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah															
				Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah regulasi tentang alokasi pupuk	2 SK	80.000.000	2 SK	80.000.000	2 SK	80.000.000	2 SK	85.000.000	2 SK	85.000.000	2 SK	90.000.000	12 SK	500.000.000
					Evaluasi dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali	
					Rapat Koordinasi	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali	
					Jumlah UMKM yang memperoleh KUR	7.500 UM KM	525.000.000	7.850 UM KM	550.000.000	8.000 UM KM	600.000.000	8.150 UM KM	600.000.000	8.300 UM KM	650.000.000	8.500 UM KM	650.000.000	8.500 UMKM	3.575.000
					Jumlah Koordinasi dalam menangani masalah	30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		180 kali	
	terbinanya BUMD	Jumlah Pengembangan BUMD		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Perudahaan Daerah memberikan konstribusi pada PAD	2 per usd a	100.000.000	2 per usd a	100.000.000	2 per usd a	100.000.000	2 per usd a	100.000.000	2 per usd a	100.000.000	2 peru sda	100.000.000	12 perusahaan	
					Kerjasama dengan pihak ketiga	1 Mo U	85.000.000	1 Mo U	90.000.000	1 Mo U	95.000.000	1 Mo U	95.000.000	1 Mo U	100.000.000	1 Mo U	100.000.000	6 MuO	565.000.000
					jumlah rapat koordinasi	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali	
					Evaluasi dan Monitoring	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		24 kali	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Syarat-syarat berlaku dalam indikator kinerja adalah relevan, penting, efektif dan layak. Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai setidaknya tidaknya memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sasaran yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur

Indikator kinerja ini akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok.

Berikut ini akan ditampilkan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja capaian SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yakni :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Nilai LPPD	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
2.	Penilaian SKPD berkinerja Baik	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
3.	Jumlah Kecamatan yangmelaksanakan TertibAdministrasi Kecamatan	0	5 Kec	10 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec
4.	Jumlah nagari yangmelaksanakan Tertib Administrasi nagari	5 nagari	5 nagari	10 nagari	20 nagari	10 nagari	10 nagari	14 nagari	74 nagari
5.	Peningkatan SDM Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari	5 nagari	5 nagari	10 nagari	20 nagari	10 nagari	10 nagari	14 nagari	74 nagari
6.	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemerintahan Kabupaten solok	0	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	6 buah

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7.	Terasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah	8 perda	8 perda	8 perda	8 perda	8 perda	8 perda	8 perda	8 perda
		20 perbup	20 perbup	20 perbup	20 perbup	20 perbup	20 perbup	20 perbup	20 perbup
		500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup	500 kepbup
8.	Jumlah sosialisasi produk hukum daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
9.	Persentase jabatan yang dievaluasi	0 %	0 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	50 %
10.	Persentase SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
11.	Rata-rata IKM	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7
12.	Nilai evaluasi SAKIP setda	C	C	C	CC	CC	CC	B	B
13.	Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
14.	Jumlah kerjasama	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah
15.	Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD
16.	Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17.	Tingkat tertib pengelolaan barang/aset daerah	30 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
18.	Prosentase temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti	88 %	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
19.	Mesjid Aktif	10 %	10 %	20 %	25 %	15 %	15 %	15 %	100 %
20.	Mesjid Paripurna	10 %	10%	20 %	25 %	15 %	15 %	15 %	100 %
21.	Kelembagaan adat dan pemangku ada yang berdaya	30 %	30 %	60 %	90 %	10 %	100 %	100 %	100 %
22.	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	30 orang
23.	Persentase urusan kesehatan yang difasilitasi dan terkoordinir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
24.	Jumlah UMKM yang memperoleh KUR	7.500 UMKM	7.500 UMKM	7.850 UMKM	8.000 UMKM	8.150 UMKM	8.300 UMKM	8.500 UMKM	8.500 UMKM
25.	Jumlah Pengembangan BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD

BAB VII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini merupakan suatu rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan sampai dengan program dan kegiatan yang merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan juga merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016- 2021.

Renstra Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok maupun semua SKPD dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini diharapkan dapat dipedomani dan di implementasikan oleh seluruh kepala bagian dalam penyusunan program kerja dan rencana kinerja tahunan oleh masing-masing bagian di lingkungan sekretariat daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan serta capaiannya dapat di evaluasi secara terukur.

Semoga Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita – cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada periode 2016 – 2021.

SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195901261986031002,

